



## Studi Tentang Kinerja Sistem Informasi Manajemen Aparatur Berbasis Digital di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi

Siti Zaadah<sup>1\*</sup>, Novita Sari<sup>2</sup>, Mar Atun Saadah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Manajemen Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [sitizaadah202@gmail.com](mailto:sitizaadah202@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the performance and factors causing the failure of the adoption of a digital-based Apparatus Management Information System (SIKILAT) in BPSDM Jambi Province using the Technology, Organization, Environment (TOE) framework. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type, so that it is able to explore in depth the obstacles faced in the implementation of the system. The results of the study show that the implementation of SIKILAT is not optimal and not sustainable. From a technological aspect, the main obstacles include lack of maintenance, limited system quality, and complexity of use. From an organizational aspect, the absence of a policy that requires the use of the system, low competence of the apparatus, and lack of user participation are significant inhibiting factors. Meanwhile, from the environmental aspect, the absence of supporting regulations and weak external pressure cause the system not to be a priority in the governance of the apparatus. These findings confirm that the successful adoption of digital-based apparatus management information systems depends not only on the quality of technology, but also on the support of organizational policies and external regulations. Therefore, an integrative strategy is needed that includes increasing user capacity, strengthening internal policies, and regulatory support so that the implementation of SIKILAT can run effectively and sustainably.*

**Keywords:** *Apparatus Performance; External Regulations; Failure Factors; Information Systems; Organizational Policies*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja serta faktor penyebab kegagalan adopsi Sistem Informasi Manajemen Aparatur berbasis digital (SIKILAT) di BPSDM Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka Technology, Organization, Environment (TOE). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, sehingga mampu menggali secara mendalam kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKILAT belum optimal dan tidak berkelanjutan. Dari aspek teknologi, hambatan utama meliputi kurangnya pemeliharaan, keterbatasan kualitas sistem, serta kompleksitas penggunaan. Dari aspek organisasi, tidak adanya kebijakan yang mewajibkan penggunaan sistem, rendahnya kompetensi aparatur, serta minimnya partisipasi pengguna menjadi faktor penghambat signifikan. Sementara itu, dari aspek lingkungan, ketiadaan regulasi pendukung dan lemahnya tekanan eksternal menyebabkan sistem tidak menjadi prioritas dalam tata kelola aparatur. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi sistem informasi manajemen aparatur berbasis digital tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi, tetapi juga pada dukungan kebijakan organisasi dan regulasi eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif yang mencakup peningkatan kapasitas pengguna, penguatan kebijakan internal, serta dukungan regulasi agar implementasi SIKILAT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Faktor Kegagalan; Kebijakan Organisasi; Kinerja Aparatur; Regulasi Eksternal; Sistem Informasi

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital saat ini mendorong perubahan diberbagai bidang, termasuk di bidang pemerintahan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menekankan bahwa digitalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi aparatur negara melalui penerapan *e-government* bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik (Wahidin *et al.*, 2025). Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu kunci utama dalam perubahan layanan dan peningkatan efisiensi operasional dalam pemerintahan (Rangkuti & Nasution, 2025). Perkembangan teknologi ini menjadikan standar baru dalam pelayanan publik seperti efisiensi, transparan dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat.

Meskipun adopsi teknologi digital dalam sektor pemerintahan terus berkembang, tingkat keberhasilan implementasinya masih menunjukkan variasi yang signifikan. Keberhasilan implementasi masih sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dan budaya birokrasi yang berkembang di lingkungan (Elazhari & Siregar, 2025). Selain itu berbagai studi juga mengungkapkan bahwa beberapa instansi, sistem informasi manajemen tidak digunakan lagi karena beberapa masalah seperti keterbatasan infrastruktur yang memadai, kurangnya kesiapan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola sistem, kurangnya dukungan kebijakan (Enala & Serano, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan implementasi teknologi dan realitas dilapangan.

Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), Sistem Informasi Manajemen digunakan untuk mengelola berbagai data dan informasi, selain itu sistem ini juga digunakan agar dapat mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja ASN (Situmorang *et al.*, 2025). Namun ketika sistem tersebut tidak digunakan lagi, perlu dianalisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Evaluasi seperti ini tidak hanya penting bagi akademik, namun juga memberikan manfaat praktis sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa banyak sistem informasi pemerintahan daerah mengalami kegagalan bahkan ada yang sudah tidak digunakan lagi karena berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan sistem (Pamungkas *et al.*, 2020).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi telah mengimplemntasikan sistem informasi manajemen yang sering di sebut dengan SIKILAT (Sistem Informasi Kediklatan) merupakan aplikasi yang berisi informasi seputar BPSDM baik dari bidang tentang diklat atau bimtek yang akan dilaksanakan (Sheilla 2023). Dampak adanya SIKILAT ini BPSDM dapat memberikan informasi mengenai kediklatan lebih mudah. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen berbasis digital yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi SIKILAT saatini sudah tidak digunakan lagi. Penyebab tidak digunakan lagi karena belum adanya optimanya SIKILAT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja serta faktor penyebab kegagalan adopsi Sistem Informasi Manajemen Aparatur berbasis digital di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, khususnya pada aplikasi SIKILAT yang tidak digunakan lagi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Technology, Organization, Environment* (TOE), yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor dari aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan sistem (Setiawan, 2024). Selain itu penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi strategis untuk pengembangan sistem informasi SIKILAT yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian dalam suatu organisasi (Armah & Firdaus, 2024). Dalam pemerintahan, Sistem Informasi Manajemen (SIM) membantu aparatur dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan serta pelayanan publik secara efisien, transparan dan akuntabilitas (Rangkuti & Nasution, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, namun juga sebagai instrumen transformasi organisasi. Penerapan SIM berbasis digital memberikan solusi dalam memantau kinerja pegawai, mempermudah pengumpulan data, penyusunan laporan, meningkatkan akuntabilitas dan transparan sehingga dapat mendukung dalam pengambilan keputusan strategis (Adila & Putri, 2024). Namun keberhasilan implementasi SIM sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas sistem dan kompetensi pengguna (Fatih *et al.*, 2024).

Namun pada kenyataannya berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan SIM yaitu tingkat pemahaman pegawai terhadap sistem, penolakan terhadap perubahan, serta ketidaksiediaan infrastruktur yang memadai (Rohim & Very, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIM tidak hanya bergantung pada teknologi, namun juga pada faktor manusia dan organisasi.

### ***E-Government* dan Transformasi Digital Pemerintahan**

*E-government* merupakan pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah seperti jaringan yang luas, internet serta komputer yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan rakyat, kelompok bisnis, ataupun aparat pemerintahan (Sellfia *et al.*, 2021). Transformasi digital dalam sektor publik merupakan tindakan strategis untuk meningkatkan

harapan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan dan bernilai tinggi (Isma *et al.*, 2025).

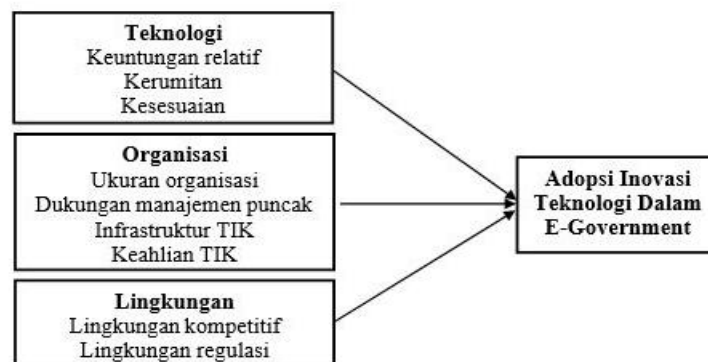
Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menegaskan pentingnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berfokus pada pelayanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Shabihah *et al.*, 2025). Namun keberhasilan transformasi digital dalam pemerintah tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja, namun juga peraturan dan manajemen sumber daya manusia. Faktor tersebut memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di era digitalisasi. Kombinasi antara teknologi, peraturan dan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan efektivitas digitalisasi dalam pemerintahan (Yuliyanti *et al.*, 2022).

Dengan demikian, transformasi digital dalam pemerintahan merupakan dimensi yang memerlukan kolaborasi antar aspek teknologi, organisasi dan lingkungan eksternal.

### **Technology, Organization, Environment (TOE)**

*Technology, Organization, Environment* (TOE) merupakan salah satu teori yang digunakan untuk meneliti implementasi teknologi yang dikenalkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan teknologi dalam organisasi. TOE terdiri dari tiga dimensi utama yang saling berhubungan yaitu teknologi, organisasi dan lingkungan (Firmasari *et al.*, 2025).

Dimensi teknologi mencakup kerumitan, manfaat yang dirasakan, kesesuaian komponen infrastruktur digital. Dimensi organisasi ini seperti struktur, kesiapan internal, dukungan atasan dan literasi digital (Lase *et al.*, 2025). Sedangkan dalam dimensi lingkungan seperti kebijakan pemerintah, regulasi secara signifikan dapat mendorong dukungan manajemen puncak (Nguyen *et al.*, 2022).



**Gambar 1.** Kerangka TOE.

Sumber: Tornatzky dan Fleischer dalam Hastanto.

Kerangka TOE ini menggunakan pendekatan yang menyeluruh untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi baru. Dengan menerapkan kerangka TOE ini pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam keberhasilan implementasi penggunaan teknologi (Suradi, 2025).

### **Manajemen Kinerja Aparatur**

Manajemen kinerja merupakan proses tersusun untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu dan kelompok (Rawinarno *et al.*, 2023). Manajemen kinerja aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi pemerintahan yang bertujuan pada hasil yang efektif dan efisien. Hal ini semakin berkembang dengan kemajuan transformasi pelayanan publik yang menuntut aparatur yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak.

Manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi termasuk dalam pelayanan publik (Irwan & Zainarti, 2025). Manajemen kinerja aparatur ini menetapkan sasaran kerja individu yang sejalan dengan rencana strategis organisasi, pelatihan, pengembangan kompetensi dan evaluasi berkelanjutan agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan (Rawinarno *et al.*, 2023).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam mengenai adopsi sistem informasi manajemen aparatur berbasis digital di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi. Menurut Saryono (2010) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif (Ratnaningtyas *et al.*, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang menyeluruh dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi yang ada (Fiantika *et al.*, 2022).

Fokus penelitian ini pada analisis kinerja sistem berdasarkan kerangka *Technology, Organization, Environment* (TOE). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aparatur yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem, dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi, laporan instansi serta literatur ilmiah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive

sampling berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu 9 orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, staf pengelola sistem (1 orang), ASN yang menggunakan sistem (1 orang), masyarakat yang mengikuti diklat (2 orang), dan peserta orientasi P3K Tahun 2024 (4 orang).

pengolahan data menurut Miles dan Huberman : Sugiono (2018) dalam Nasution, 2023 menjelaskan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Adopsi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Berbasis Digital di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi berdasarkan Perspektif TOE**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur berbasis digital (SIKILAT) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi belum berjalan secara optimal dan tidak berkelanjutan. Sistem yang awalnya dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi kediklatan dan manajemen aparatur secara digital tidak digunakan lagi dalam operasional organisasi. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pengembangan sistem dengan realitas implementasinya di lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat tiga dimensi adopsi sistem informasi manajemen berbasis digital berdasarkan perspektif teori TOE yaitu teknologi, organisasi dan lingkungan.

Dari aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem SIKILAT masih belum memadai, baik dalam hal kemudahan penggunaan maupun keandalan sistem. Menurut staf pengelola sistem mengatakan bahwa sistem SIKILAT ini belum mampu menampung banyak peserta dan diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 100-200 peserta saja. Selain itu kurangnya perawatan dan pembaruan sistem mengakibatkan sistem tidak berjalan secara optimal.

Dari aspek organisasi, keberlanjutan SIKILAT dipengaruhi oleh dukungan manajemen yang belum teroptimalisasi dalam kebijakan yang tegas serta kompetensi SDM yang masih terbatas. Selain itu tidak adanya kebijakan yang mewajibkan penggunaan sistem menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pengguna.

Dari aspek lingkungan, penelitian menemukan bahwa tidak adanya tekanan eksternal maupun regulasi yang kuat mempengaruhi keberlanjutan sistem. SIKILAT tidak menjadi utama karena tidak didukung dengan kebijakan yang mewajibkan penggunaan sistem tersebut. Hal ini

menyebabkan sistem tidak berjalan secara optimal dan tidak dikembangkan.

### **Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam adopsi sistem informasi manajemen aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi**

Melalui wawancara yang dilakukan kepada kepala Subbagian Program dan pelaporan mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan kegagalan adopsi sistem SIKILAT yaitu banyaknya peserta diklat yang belum memahami alur pendaftaran melalui SIKILAT, sehingga peserta lebih memilih pendaftaran secara manual. Selain itu kurangnya perawatan yang mengakibatkan banyak fitur-fitur yang belum dapat diperbarui.

Selain itu menurut staf pengelola sistem, kegagalan penggunaan SIKILAT disebabkan oleh keterbatasan sistem dalam menampung jumlah peserta diklat, rendahnya kesiapan dan kebiasaan sumber daya dalam menggunakan aplikasi berbasis akun serta kurangnya perawatan dan pengelolaan. Selain itu faktor yang menyebabkan kegagalan yaitu belum adanya kebijakan atau regulasi yang mewajibkan penggunaan SIKILAT dalam setiap kegiatan diklat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam adopsi sistem informasi manajemen aparatur berbasis digital yaitu rendahnya pemahaman peserta diklat terhadap alur, keterbatasan kapasitas sistem dan rendahnya kesiapan dan kebiasaan sumber daya dalam menggunakan aplikasi, kurangnya perawatan dan pengelolaan sistem serta belum adanya kebijakan yang mewajibkan penggunaan SIKILAT dalam setiap kegiatan diklat.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan TOE sangat relevan digunakan untuk menganalisis kinerja dan keberlanjutan sistem informasi di sektor pemerintahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan keberhasilan implementasi di masa depan, diperlukan perbaikan pada kualitas sistem, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, penguatan kebijakan internal serta dukungan regulasi yang dapat mendorong penggunaan sistem secara berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adopsi sistem informasi manajemen aparatur berbasis digital di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi melalui perspektif TOE belum berjalan secara optimal dan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab kegagalan adopsi SIKILAT yaitu kurangnya perawatan dan pengelolaan sistem, keterbatasan sistem dalam menampung banyak pengguna, belum optimalnya kemudahan pengguna, belum adanya kebijakan yang mewajibkan penggunaan sistem dalam setiap kegiatan, serta tidak adanya regulasi yang mengikat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keberhasilan implementasi di masa depan, diperlukan perbaikan pada kualitas sistem, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, penguatan kebijakan internal serta dukungan regulasi yang dapat mendorong penggunaan sistem secara berkelanjutan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BPSDM perlu melakukan perawatan dan oembaruan sistem SIKILAT secara rutin dan terjadwal, menyelenggarakan pelatihan rutin bagi seluruh pengguna SIKILAT, membuat panduan penggunaan (SOP) yang jelas dan mudah dipahami terkait alur sistem, menetapkan kebijakan internal yang secara tegas mewajibkan penggunaan SIKILAT dalam setiap kegiatan diklat serta diperlukan penyusunan regulasi atau pedoman secara resmi untuk mendukung implementasi sistem digital secara memnyeluruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adila, N., & Putri, L. D. M. (2024). Digitalisasi tata kelola SDM aparatur di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2125>
- Armah, S., & Firdaus, R. (2024). Konsep dan penerapan sistem informasi manajemen. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital*, 1(3), 50–56. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v1i3.192>
- Elazhari, & Siregar, B. (2025). Reformasi birokrasi dan tantangan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal: Analisis kritis terhadap implementasi sistem merit. *Jurnal All Fields of Science J-LAS*, 5(2), 138–149. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Enala, S. H., & Serano, V. R. (2025). Penerapan e-government di Merauke: Studi kasus sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi. *PJHP: Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(1), 74–81.
- Fatih, Erminah, Ahmad, Nikri, Gratianus, Ikhwan, Aziz, & Ikasari, I. H. (2024). Faktor penentu efektivitas sistem informasi di sektor publik. *Jurnal Riset Informatika dan Inovasi*, 2(3), 435–440.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Y. Novita, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Firmasari, P., Arpilliya, P., & Kurnia, M. S. (2025). Peran technology-organization-environment (TOE) dan digital finance terhadap kinerja bisnis UMKM Provinsi Jambi melalui green innovation. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 14(3).
- Irwan, D., & Zainarti. (2025). Implementasi manajemen kinerja dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kantor Desa Hutagodang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 476–483.

- Isma, Y. S., Kardianti, D., Muslem, Fadhillah, S. K., Jamiati, K., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 66–77. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1891>
- Lase, D., Absah, Y., Lumbanraja, P., Giawa, Y., & Gulo, F. (2025). Infrastruktur digital dalam perspektif konseptual: Kajian teoretis, temuan empiris, dan agenda riset masa depan. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 80–94. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.131>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (M. Albina, Ed.). CV Harafa Creative.
- Nguyen, T. H., Le, X. C., & Vu, T. H. L. (2022). An extended technology-organization-environment (TOE) framework for online retailing utilization in digital transformation: Empirical evidence from Vietnam. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/joitmc8040200>
- Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulistyono, S. (2020). Evaluasi faktor kegagalan sistem informasi pada kesiapan penerapan e-government: Studi literatur. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 3(3), 143–152. <https://doi.org/10.33387/jiko>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Rangkuti, Z. S., & Nasution, M. I. P. (2025). Pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efisiensi operasional di sektor publik. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 180–184. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3144>
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syarifuddin, Saputra, E., & Suliwati, D. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (N. Saputra, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rawinarso, T., Shafira, N., Widiarto, A., & Alynudin, S. (2023). Manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis bekerja dari rumah (work from home). *Jurnal Ilmiah Niagara*, 15(1), 113–129.
- Rohim, R., & Very, J. (2025). Penerapan model DeLone dan McLean dalam menilai keberhasilan sistem informasi manajemen di sektor publik. *Syntax Idea*, 7(3).
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2021). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi Sampurasun Purwakarta. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(4), 590–598.
- Setiawan, D. (2024). *Model adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk usaha mikro kecil di Provinsi Jambi* (Skripsi). Universitas Jambi.
- Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., & Nurkumalawati, I. (2025). Peran e-governance sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. *Journal of Administration and International Development*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.52617/jaid.v5i1.731>
- Situmorang, I. S., Arfyanti, I., & Lailiyah, S. (2025). Analisis penerapan sistem informasi manajemen ASN pada BKD Provinsi Kalimantan Timur menggunakan metode technology acceptance model. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 843–851. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.580>
- Suradi, A. (2025). A theoretical extension of technology organization environment (TOE) in e-government: A systematic literature review and theory evaluation. *Journal of Computer Science and Technology JCS-TECH*, 5(1), 29–36.

- Wahidin, S. G. S., Maharani, A., Syakira, V. A., Syita, H. N., & Mawar. (2025). Analisis perbandingan penerapan e-government di Indonesia dan Singapura (kajian pengelolaan manajemen keuangan pada organisasi publik). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 491–499.
- Yuliyanti, F., Radjikan, R., & Santoso, T. (2022). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1288–1293. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.123>